

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua

Anita De Grave^{1*}, Syahril Hasan²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

¹anita@stiebalikpapan.ac.id

^{*}Penulis korespondensi

Abstract

This study aimed at determining how the effect of the variabls of human resources' quality, organizational commitment, and SIPKD on the implementation of accrual-based Government Accounting Standards in the Government of Balikpapan City district both partially and simultaneously. The population of the unit of analysis in this study was 18 official governments in Balikpapan City. The sampling was through the purposive sampling technique with total respondents of 72 people. The data collection was conducted through a questionnaire and the measurement was conducted through a Likert scale. The results of this study are partial, the variabel of the quality of human resources, organizational commitment, and SIPKD significantly affected the implementation of accrual-based Government Accounting Standards in the Government of Balikpapan City. Simultaneously, the quality of human resources, organizational commitment, and SIPKD significantly affected the implementation of accrual-based Government Accounting Standards in the Government of Balikpapan City.

Keywords: Quality of Human Resources, Organizational Commitment, Regional Financial Management Information System, Accrual Government Accounting Standar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan SIPKD terhadap penerapan SAP berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Balikpapan secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah 18 Dinas Pemerintah Kota Balikpapan. Cara pengambilan sampelnya adalah dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran menggunakan skala linkert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial, variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Balikpapan. Secara simultan, variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan SIPKD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrua pada Pemerintah Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah Akrua

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat menjadi suatu tuntutan yang sangat umum. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan pembangunan serta pembuatan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Dalam rangka menciptakan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha diantaranya yaitu menyiapkan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan peraturan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berbagai penyesuaian penata usahaan dilakukan untuk mendukung perubahan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka diperlukan adanya kesiapan dari pemerintah.

Salah satu bentuk kesiapan pemerintah dalam proses perubahan ini yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten. Pemerintah wajib memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidang keuangan daerah serta sistem akuntansi dalam penyusunannya dengan tujuan mempercepat proses perubahan standar akuntansi pengelolaan keuangan negara (Pratiwi et al., 2017).

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang melibatkan sumber daya manusia maka sangat diperlukan kerja keras serta komitmen organisasi dalam menjalankan suatu perubahan terhadap standar pengelolaan negara agar berjalan lebih efektif. Namun tentunya terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. SIPKD diharapkan dapat membantu mempermudah organisasi dalam perubahan standar pemerintahan. Sistem informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam perubahan penerapan standar akuntansi (Arif, 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Untuk mengelolah pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan keuangannya.

Pemerintah melakukan perubahan pada pengelolaan keuangan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari dual basis yaitu basis kas menuju akrual menjadi akrual penuh.

Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru maka pemerintah diwajibkan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu

tahun anggaran menjadi lebih berkualitas. Bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam LKPD harus sesuai dengan SAP yang berlaku yaitu sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Setelah BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD maka laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa laporan yang telah dilaporkan sudah disajikan memenuhi karakteristik laporan keuangan yang terdapat pada PP No. 71 Tahun 2010.

IHPS I Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan BPK atas 85 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020. Dari 86 LK tersebut, 84 LK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 (dua) LK memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), LK Pemerintah Provinsi yang memperoleh opini WTP sebanyak 33 dari 34 LK (97%), LK Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP sebanyak 365 dari 415 LK (88%), dan LK Pemerintah Kota yang memperoleh opini WTP sebanyak 88 dari 93 LK (95%).

Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur yang sedang berkembang yang terkenal dengan sebutan Kota Minyak dan merupakan gerbang utama menuju ibu kota Indonesia yang baru. Balikpapan pertama kali meraih opini WTP yang merupakan salah satu indikator pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yaitu pada LKPD 2014 sampai dengan tahun 2021.

Kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi di suatu daerah bisa berdampak terhadap opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun selanjutnya. Oleh karena itu, Balikpapan harus melakukan penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam PP No 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setelah dilakukan penetapan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrual dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya KSAP melakukan sosialisasi SAP Berbasis Akrual kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). SAP Berbasis Akrual diterapkan di lingkungan pemerintahan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah (Erlina et al., 2015).

Walaupun memiliki kelebihan, akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada berbagai tantangan untuk dapat menerapkannya. Beberapa faktor yang merupakan tantangan penerapan yang perlu diatasi, yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, pendanaan, resistensi, dan komitmen pimpinan.

Menurut Jaladri & Riharjo (2016), kualitas sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam suatu organisasi (kelembagaan) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Puspitarini et al., 2017). Kualitas sumber daya manusia

merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki individu sesuai dengan tugasnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi et al. (2018), Darma & Ramadhan (2018), dan Safitri (2017) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi (Nasution, D & Ramadhan, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan system akuntansi berbasis akrual.

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kota Balikpapan

Komitmen organisasi menjadi salah satu peran utama bagi sumber daya manusia sebagai faktor pendukung dalam terlaksananya proses kegiatan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya komitmen dalam organisasi suatu perubahan akan lebih cepat direalisasikan. Robbins dan Judge (2013) mendefinisikan komitmen dalam organisasi sebagai tingkatan sampai mana seorang pegawai memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasinya. Sejalan dengan hal tersebut, Jaladri (2017) menyatakan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen untuk tanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan komitmen yang tinggi maka suatu organisasi akan mampu kinerja yang baik dan dengan dukungan system yang baik maka kinerja organisasi tersebut juga akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jantong et al. (2019) mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Sementara itu Dewi, et al. (2018) menyatakan bahwa penerapan SAP tanpa komitmen hanya akan menjadi hal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Setiap SKPD menginginkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kota Balikpapan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer dana dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Yogasworo & Suprayitno, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Henukh, dkk (2020) yang menyebutkan bahwa SIPKD berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Aplikasi ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam suatu organisasi, penggunaan sistem informasi keuangan yang lebih maju lebih dapat membantu dalam penerapan sistem akuntansi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak menggunakan sistem informasi terbaru.

H₃: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

METODE

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 dengan populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural sebanyak 1.747 orang pada 18 Dinas Pemerintah Kota Balikpapan. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: 1). Sampel penelitian berupa pejabat struktural yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada OPD Kota Balikpapan, dengan 4 orang responden di masing-masing OPD; 2). Sampel merupakan OPD yang dianggap memiliki peran utama dalam pelaksanaan kegiatan otonomi daerah dengan lama bekerja minimal 5 tahun; 3). Sampel merupakan pejabat struktural yang terlibat dalam SIPKD secara langsung. Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan Sampel yaitu sebanyak 4 orang responden per dinas untuk penelitian ini. Total kuesioner yang dibagikan adalah 72 kuesioner, dengan hasil 61 kuesioner yang dapat diolah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan alat regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

X₁ : Kualitas Sumber Daya Manusia

X₂ : Komitmen Organisasi

X₃ : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

b₁ : Koefisien Regresi Untuk X₁

b₂ : Koefisien Regresi Untuk X₂

b₃ : Koefisien Regresi Untuk X₃

a : Konstanta

e : Standar Error

Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual	Salah satu bentuk reformasi dari sistem yang lama yaitu SAP basis akrual menuju kas ke sistem yang baru yaitu SAP basis akrual penuh demi tercapainya tujuan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan pendapatan 2. Pengakuan beban 3. Pengakuan aset 4. Pengakuan utang 5. Pengakuan ekuitas
Kualitas Sumber Daya Manusia	Skill atau kemampuan yang dimiliki setiap individu dalam melakukan pekerjaannya demi mencapai tujuan pemerintah yang sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang penyusunan laporan 2. Latar belakang pendidikan 3. Pelatihan keahlian dalam tugas 4. Pengalaman 5. Kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi
Komitmen Organisasi	Kemauan individu dalam mengutamakan kepentingan organisasi dalam pencapaian tujuan pemerintah yang sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loyalitas 2. Kesiapan organisasi dalam melakukan perubahan 3. Profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi & tanggungjawabnya 4. Komitmen dan integritas pemerintah 5. Keterlibatan organisasi secara utuh
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Salah satu sistem informasi penunjang tercapainya tujuan pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan informasi akuntansi 2. Perubahan sistem pelaporan yang sesuai dengan SAP 3. Laporan keuangan yang terkomputerisasi 4. Pemeliharaan yang teratur

Sumber: Berbagai referensi, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validity

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	X1.1	0,707	0,252
	X1.2	0,565	0,252
	X1.3	0,622	0,252
	X1.4	0,621	0,252
	X1.5	0,707	0,252
Komitmen Organisasi	X2.1	0,515	0,252
	X2.2	0,621	0,252
	X2.3	0,678	0,252
	X2.4	0,722	0,252
	X2.5	0,671	0,252
SIPKD	X3.1	0,676	0,252
	X3.2	0,536	0,252
	X3.3	0,532	0,252
	X3.4	0,647	0,252
	X3.5	0,660	0,252
Penerapan SAP Berbasis Akrua	Y.1	0,660	0,252
	Y.2	0,817	0,252
	Y.3	0,687	0,252
	Y.4	0,810	0,252
	Y.5	0,763	0,252

Sumber: Data diolah, 2021

Nilai r tabel diperoleh dengan rumus $DF = N - 2$, sehingga untuk penelitian ini $DF = 61 - 2$ yaitu 59. Dengan bantuan tabel F maka didapat nilai r tabel 0,252. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item masing-masing instrumen pernyataan valid karena nilai r hitung > r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

Uji Reabilitas

Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,630
Komitmen Organisasi	0,642
SIPKD	0,638
SAP Berbasis Accrual	0,804

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, SIPKD, dan SAP Berbasis Akruar dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Cara ini mendeteksi apakah residual model regresi pada penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,36667186
	Absolute	0,098
Most Extreme Differences	Positive	0,098
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah, 2021

Data pada Tabel 4 menunjukkan hasil uji normalitas dengan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (> 0,05) yakni sebesar 0,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dengan kata lain data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,791	1,265
Komitmen Organisasi	0,748	1,337
SIPKD	0,830	1,204

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas atau independen yang ditandai dengan nilai VIF untuk semua variabel independent lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* semua variabel independent juga lebih besar dari 0,1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Spearman's rho
	Sig.
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,307
Komitmen Organisasi	0,304
SIPKD	0,097

Sumber: Data diolah, 2021

Dari data pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan nilai Absolute Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Linear Berganda

Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Analisis Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-3,347	2,715
Kualitas SDM (X1)	0,254	0,095
Komitmen Organisasi (X2)	0,654	0,110
SIPKD (X3)	0,246	0,114

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel 7, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,347 + 0,254X1 + 0,654X2 + 0,246X3 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3,347 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (kualitas SDM, komitmen organisasi, dan SIPKD) adalah nol maka penerapan SAP berbasis akrual akan terjadi sebesar -3,347.

2. Koefisien regresi variabel kualitas SDM (X1) sebesar 0,254 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas SDM akan meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual sebesar 0,254.
3. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi (X2) sebesar 0,654 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel komitmen organisasi akan meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual sebesar 0,654.
4. Koefisien regresi variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebesar 0,246 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel SIPKD akan meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual sebesar 0,246.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Uji t

	t (t tabel: 2,0025)	Sig.
(Constant)	-1,233	0,223
Kualitas_SDM (X1)	2,660	0,010
Komitmen_Organisasi (X2)	5,949	0,000
SIPKD (X3)	2,154	0,036

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel 8, diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Balikpapan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,660 > 2,0025$) dan tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$. Variabel kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator pemahaman tentang penyusunan laporan, latar belakang pendidikan, pelatihan keahlian dalam tugas, pengalaman, dan kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan karakteristik responden yang sebagian besar di dominasi oleh lulusan S1 sebanyak 51%, kemudian disusul dengan lulusan D3 sebanyak 34%. Selain itu responden dalam penelitian ini juga di dominasi oleh pegawai dinas bagian keuangan yang telah bekerja dengan rentang waktu lebih dari 11 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai keuangan di dinas Kota Balikpapan telah berpengalaman akan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaannya.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Handayani (2018), Darma & Ramadhan (2018), dan Safitri (2017) yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan bertentangan dengan penelitian Jantong, dkk (2018) yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Selanjutnya, sesuai dengan hasil analisis pada Tabel 8 diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Balikpapan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,949 > 2,0025$) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan merupakan yang paling dominan diantara variabel lainnya, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual telah terbukti kebenarannya. Variabel komitmen organisasi diukur dengan indikator loyalitas, kesiapan organisasi dalam melakukan perubahan, profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi & tanggungjawabnya, komitmen dan integritas pemerintah, keterlibatan organisasi secara utuh.

Hal ini sudah diterapkan oleh seluruh dinas di Kota Balikpapan seiring berjalannya waktu. Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya prestasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Pemerintah Kota Balikpapan sejak 2014 dan bahkan masih dapat dipertahankan hingga tahun 2020.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaladri & Riharjo (2016), Putri & Silviana (2017) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan bertentangan dengan penelitian Pratiwi & Zutilisna (2017) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jantong, dkk (2018).

Berikutnya, diperoleh hasil bahwa SIPKD berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Balikpapan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,154 > 2,0025$) dan tingkat signifikansi $0,036 < 0,05$. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur variabel SIPKD yaitu kemajuan informasi akuntansi, perubahan sistem pelaporan yang sesuai dengan SAP, laporan keuangan yang terkomputerisasi, pemeliharaan yang teratur. Seluruh dinas di Kota Balikpapan telah menerapkan SIPKD seiring berjalannya waktu, mulai dari perubahan sistem pelaporan yang sesuai dengan SAP hingga pemeliharaan sistem yang teratur. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Henukh, dkk (2020) yang menyebutkan bahwa SIPKD berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Pemerintah Kota Balikpapan terbukti kebenarannya dengan masing-masing nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah kota Balikpapan sudah cukup baik, dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian tentu saja merupakan salah satu alat ukur atas keberhasilan tersebut.

Sejalan dengan hasil penelitian ini tentu saja Pemerintah daerah Kota Balikpapan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan penerapan SIPKD dengan memberikan pelatihan khusus kepada sumber daya manusia agar dapat meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

PUSTAKA ACUAN

- Arif, R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan). *Media Mahardhika*, 18(3), 378–386. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29062/mahardhika.v18i3.176>.
- Azman, T. (2015). Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *Sorot*, 10(1), 131–142. <https://doi.org/10.31258/sorot.10.1.3210>
- BPK RI. (2019). IHPS I Tahun 2019. In *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2019/I/ihps_i_2019_1568693769.pdf
- BPK RI. (2019). IHPS I Tahun 2019. In *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2019/I/ihps_i_2019_1568693769.pdf
- Citra Dewi, Nofiana. dan Handayani, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–22.
- Erlina., Rambe, Omar Sakti., & R. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*.
- Henukh, I. T., Saleh, M. F., & Adelina, Y. E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(02), 130–154. <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal>.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 13–23. <https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23>
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 1–41. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, 1–61. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152400.pdf
- Indonesia, R. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 1–14. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49722/pp-no-56-tahun-2005>

- IPSASB. (2011). *Study 14: transition to the accrual basis of accounting: guidance for governments and government entities* (Issue January). <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-study-14-3e.pdf>
- Irfani, M., Pituringsih, E., & Hamdani Husnan, L. (2020). Determinants Of Success In The Application Of Accrual- Based Institution Accounting Systems In Preparing Government Financial Statements. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1522–1538. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Jaladri, E. Q., & Riharjo, I. B. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2464>
- Jantong, A., Nurkholis, N., & Roekhudin, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 158–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2389>
- Kristiawati, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas*, 8(3), 171–190. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_905954036659.pdf
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2018). Analisis Pengaruh SDM, Insentif dan Sarana Pendukung terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 207–218.
- Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Tekonologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 7–11. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/download/363/186>
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>
- Putri, Utami Dewi., & S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. *Proceedings*, 561–579. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_250277316462.pdf
- Robbins, Stephen P., dan Judge, Timothy. (2013). *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Safitri, D. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, Vol.5(2), 174–189. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/4063/3939>
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

- Supra, D. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*, 5(2), 9-23.
- Yogasworo, N. A., & Suprayitno, S. (2020). Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Equity*, 22(2), 109. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1249>